



## **Efektivitas Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) Dalam Mewujudkan Prinsip Tridaya Di Kota Pekanbaru**

**Emma Fitri Lubis<sup>1</sup> Evi Zubaidah<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau, Jl. Kaharuddin Nasution No.113 Perhentian Marpoyan, Pekanbaru, Indonesia

emafitrilubis@soc.uir.ac.id

<sup>2</sup>Administrasi Perkantoran, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau, Jl. Kaharuddin Nasution No.113 Perhentian Marpoyan, Pekanbaru, Indonesia

evizubaidah@soc.uir.ac.id

Received : Agustus 5, 2019; Accepted : September 5, 2019

DOI : 10.25299/jiap.2019.vol5(2).4188

### **Abstract**

*The PMB-RW Program aims to create and improve the quality of community life, both individually and in groups to participate in solving various problems related to efforts to improve the quality of life, independence, and community welfare. The purpose of this research is: To find out how the effectiveness of Community-Based Community Empowerment Program (PMB-RW) in Realizing Tridaya Principles in Pekanbaru City. And to analyze what are the factors that influence the Effectiveness of Community-Based Community Empowerment Program (PMB-RW) in Realizing Tridaya Principles in Pekanbaru City. This research uses qualitative research with descriptive methods. The findings of this study based on the indicators used are 1. The PMB-RW program process is seen from the communication, decision making, employee development until the socialization has been carried out because this program has been started from 2014. 2. The efficiency of the PMB-RW program is still considered ineffective. 3. Satisfaction of PMB-RW Program which is assessed from the level of apparatus performance, and the level of public / community. 4. The excellence of the PMB-RW program is judged by its satisfaction, consistency, and bureaucratic structure. 5. Development of PMB-RW programs that refer to intervention strategies and achievement of objectives.*

**Key Words :** Effectiveness, Community Empowerment

### **Abstrak**

Program PMB-RW ini bertujuan menciptakan dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, baik secara individu maupun kelompok untuk turut berpartisipasi memecahkan berbagai permasalahan yang terkait pada upaya peningkatan kualitas kehidupan, kemandirian, dan kesejahteraan masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah : Untuk mengetahui bagaimanakah Efektivitas Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) dalam Mewujudkan Prinsip Tridaya di Kota Pekanbaru. Dan untuk menganalisis apa saja faktor – faktor yang mempengaruhi Efektivitas Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) dalam Mewujudkan Prinsip Tridaya di Kota Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Temuan dari penelitian ini berdasarkan indikator yang digunakan terdapat 1. Proses program PMB-RW dilihat dari komunikasi, pengambilan keputusan, pengembangan pegawai sampai sosialisasi sudah dilaksanakan karena program ini telah dimulai dari tahun 2014. 2. Efisiensi program PMB-RW dinilai masih kurang efektif. 3. Kepuasan Program PMB-RW yang dinilai dari tingkat kinerja aparatur, dan tingkat public/masyarakat. 4. Keunggulan program PMB-RW dinilai dari kepuasan, konsistensi, dan struktur birokrasi. 5. Pengembangan program PMB-RW yang merujuk kepada strategi intervensi dan pencapaian tujuan.

**Key Words :** Efektivitas, Pemberdayaan Masyarakat

## Pendahuluan

PMB-RW yang merupakan program pengganti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP). PNPM Mandiri sendiri dikukuhkan dan disahkan serta diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 30 April 2007 di kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Program ini bisa dikatakan sebagai program pemberdayaan masyarakat terbesar di tanah air. Namun PNPM Mandiri pedesaan tidak lagi dilanjutkan oleh pemerintah pada tahun 2015. Hal ini seiring diberlakukannya Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Program PMB-RW ini bertujuan menciptakan dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, baik secara individu maupun kelompok untuk turut berpartisipasi memecahkan berbagai permasalahan yang terkait pada upaya peningkatan kualitas kehidupan, kemandirian, dan kesejahteraan masyarakat. Mekanisme penyelenggaraan program PMB RW menerapkan pendekatan pembangunan berkelanjutan berbasis masyarakat melalui pelibatan masyarakat secara utuh dalam seluruh tahapan kegiatan, mulai dari pengorganisasian, perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan di lapangan.

Untuk mewujudkan pemberdayaan masyarakat berbasis rukun warga, kota Pekanbaru membutuhkan kerjasama antar pemerintah dengan perangkat masyarakat di tingkat bawah yakni ketua Rukun warga (RW) itu sendiri. Oleh sebab itu, dibutuhkan mekanisme yang menjamin upaya RW dan fasilitator (pendamping) untuk melakukan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga di Kota Pekanbaru. Salah satu

mekanismenya adalah melalui prinsip Tridaya yaitu pemberdayaan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan pemberdayaan lingkungan kepada seluruh RW yang ada di Kota Pekanbaru. PMB-RW ini ditargetkan Pemerintah Kota Pekanbaru dapat menyentuh pada seluruh Rukun Warga (RW) di Pekanbaru yang direncanakan akan mendapatkan dana masing-masing RW.

Komitmen Pemerintah Kota Pekanbaru melalui PMB-RW telah dinyatakan melalui Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 44 Tahun 2014 kemudian diperbaharui dengan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 69 Tahun 2015 Tentang Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga. Program PMB-RW ini telah termuat didalam peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) Kota Pekanbaru. Arah dan jangkauan pengaturan Perda tentang Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga Kota Pekanbaru adalah mendorong penguatan kapasitas kepada Pemerintah Daerah, Kecamatan, Kelurahan, Rukun Warga, Fasilitator, Kelompok peduli tentang PMB-RW dengan membangun Lembaga Keswadayaan Masyarakat Rukun Warga (LKM-RW) dan Kelembagaan Rukun Warga sebagai pusat pelayanan masyarakat.

Sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 44 Tahun 2014 maka program PMB-RW ini mempunyai pelaksanaan yang jelas agar meningkatkan kesejahteraan : 1. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi, 2. Meningkatkan sosial kaum miskin, 3. Memperluas kesempatan kerja melalui konsultasi masyarakat, 4. Pemberdayaan dan pembangunan kapasitas local.

Program PMB-RW ini memiliki lima strategi dasar untuk mencapai hasil dari implementasinya sendiri, yaitu :

1. Untuk penataan ruang kota,
2. Melakukan pembenahan infrastruktur dasar,
3. Penerapan pendekatan kota modern,
4. Pengembangan kawasan perkotaan,
5. Untuk pemberdayaan masyarakat.

Untuk mewujudkan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun warga Kota Pekanbaru dibutuhkan kerjasama antara pemerintah dengan perangkat masyarakat di tingkat bawah yakni ketua Rukun Warga (RW). Oleh sebab itu, dibutuhkan mekanisme yang menjamin upaya RW dan fasilitator (pendamping) untuk melakukan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga di Kota Pekanbaru. Salah satu mekanismenya adalah melalui Prinsip Tridaya yaitu Pemberdayaan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan pemberdayaan lingkungan kepada seluruh RW yang ada di kota Pekanbaru.

## Tinjauan Pustaka

### Efektivitas

Pengertian lain menurut Susanto, "Efektivitas merupakan daya pesan untuk mempengaruhi atau tingkat kemampuan pesan-pesan untuk mempengaruhi" (Susanto, 1975:156). Menurut pengertian Susanto diatas, efektivitas bisa diartikan sebagai suatu pengukuran akan tercapainya tujuan yang telah direncanakan sebelumnya secara matang. Efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat tercapai (Sedarmayanti, 1995:61). Pendapat tersebut menyatakan bahwa efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target yang telah ditetapkan sebelumnya oleh lembaga 11 atau organisasi dapat tercapai. Hal tersebut

sangat penting peranannya di dalam setiap lembaga atau organisasi dan berguna untuk melihat perkembangan dan kemajuan yang dicapai oleh suatu lembaga atau organisasi itu sendiri.

Setiap organisasi atau lembaga di dalam kegiatannya menginginkan adanya pencapaian tujuan. Tujuan dari suatu lembaga akan tercapai segala kegiatannya dengan berjalan efektif akan dapat dilaksanakan apabila didukung oleh faktor-faktor pendukung efektivitas. Dari pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan ukuran yang menunjukkan seberapa jauh program atau kegiatan mencapai hasil dan manfaat yang diharapkan.

Efektivitas berfokus pada outcome (hasil), atau kegiatan yang dinilai efektif apabila output yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan atau dikatakan *spending wisely*. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada mengenai hubungan arti efektivitas di bawah ini.

Gambar 1

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Outcome}}{\text{Output}}$$

Sumber : Mahmudi (2005:92)

Sehubungan dengan pengertian di atas, maka efektivitas adalah menggambarkan seluruh siklus input, proses dan output yang mengacu pada hasil guna daripada suatu organisasi, atau kegiatan yang menyatakan sejauhmana tujuan (kualitas, kuantitas, dan waktu) telah dicapai, serta ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya dan mencapai target-targetnya.

Ukuran Efektivitas Menurut Gibson, Ivancevich dalam bukunya organisasi. Prilaku, stuktur dan proses efektivitas juga merupakan pengukuran dalam arti

tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Adapun ukuran efektivitas organisasi secara umum dapat dilihat dari beberapa kriteria berikut ini:

1. Proses adalah merupakan kemampuan organisasi untuk memproduksi jumlah dan mutu output sesuai dengan permintaan lingkungan.
2. Efisiensi adalah merupakan perbandingan (ratio) antara output dengan input.
3. Kepuasan adalah merupakan ukuran untuk menunjukkan tingkat dimana organisasi dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.
4. Keunggulan adalah tingkat dimana organisasi dapat dan benar-benar tanggap terhadap perubahan internal dan eksternal.
5. Pengembangan adalah merupakan mengukur kemampuan organisasi untuk meningkatkan kapasitasnya dalam menghadapi tuntutan masyarakat. (Gibson, 1996:34)

### **Pemberdayaan**

Pemberdayaan yang merupakan terjemahan dari kata "empowerment" menurut Webster dalam Prijono dan Pranarka (1996:3) mengandung pengertian yaitu : pertama adalah to give power authority to, dan yang kedua berarti to give ability to or enable. Dalam pengertian pertama diartikan sebagai memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas ke pihak lain.

Sementara itu, Sutrisno (2000:185) menjelaskan, dalam perspektif pemberdayaan, masyarakat diberi

wewenang untuk mengelola sendiri dana pembangunan baik yang berasal dari pemerintah maupun dari pihak lain, disamping mereka harus aktif berpartisipasi dalam proses pemilihan, perencanaan, dan pelaksanaan pembangunan. perbedaannya dengan pembangunan partisipatif adalah keterlibatan kelompok masyarakat sebatas pada pemilihan, perencanaan, dan pelaksanaan program, sedangkan dana tetap dikuasai oleh pemerintah.

### **Metode**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu jenis penelitian yang bertujuan untuk membuat deskriptif (gambaran) dan hubungan antara fenomena yang diselidiki. Penelitian ini menggunakan informan penelitian sebagai sumber informasi untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian tentang Efektifitas Program Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) Dalam Mewujudkan Prinsip Tridaya Di Kota Pekanbaru di Kelurahan Tangkerang Selatan Kecamatan Bukit Raya. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, dokumentasi dan observasi.

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **Efektifitas Program Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) Dalam Mewujudkan Prinsip Tridaya Di Kota Pekanbaru**

Penelitian Efektifitas Program PMB-RW ini dilakukan di kelurahan Tangkerang Selatan Kecamatan Bukit Raya dimana hasil wawancara terhadap koordinator kota 1 orang dan fasilitator program di kelurahan 1 program serta melakukan kroscek terhadap RW pemanfaat Program PMB-RW sebanyak 12

RW. Berdasarkan ke lima indikator maka didapat hasilnya sebagai berikut :

### 1. Proses Program PMB-RW

Proses adalah merupakan kemampuan program untuk memproduksi jumlah dan mutu output sesuai dengan permintaan lingkungan. Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga telah dilaksanakan mulai tahun 2014. kemudian tahun 2015, melalui APBD murni dana sebesar Rp 50 juta/RW disalurkan kepada 300 RW sasaran yang tersebar di sejumlah kecamatan se- kota Pekanbaru.

Adapun proses program ini melalui beberapa tahapan, yaitu :

- a. Fase Inisiasi : 5 Tahun
- b. Fase Partisipatori : 3 Tahun
- c. Fase Mandiri : Tak Terhingga

Sedangkan tahapan pelaksanaannya adalah sebagai berikut : sosialisasi, Pembentukan LKM-RW ( Lembaga Keswadayaan Masyarakat Rukun Warga), perencanaan program/kegiatan, pelaksanaan, evaluasi. Berdasarkan program PKH ini dalam hal proses sudah efektif

### 2. Efisiensi Program PMB-RW

Efisiensi adalah merupakan perbandingan (ratio) antara output dengan input. Adapun jumlah RT dan RW di kelurahan Tangkerang Selatan tersebut adalah 46 dan 12:

Tabel. 1.

Jumlah RT dan RW di Kelurahan Tangkerang Selatan

No	Kelurahan	Jumlah RT	Jumlah RW
1	Tangkerang Selatan	46	12

Sumber : Kantor Lurah Tangkerang Selatan

Berdasarkan tabel diatas terdapat 12 RW yang akan melaksanakan program PMB-RW. Berikut kegiatan fisik yang telah

dilaksanakan dengan program PMB-RW di kecamatan Bukit Raya Tahun 2017 :

Tabel. 2.

Tabel Pelaksanaan Program PMB-RW Di Kecamatan Bukit Raya

No	Kelurahan	RW	Jenis Kegiatan	Jumlah Dana
1	Simpang Tiga	02	Rehap Drainase	Rp. 24.205.000,-
2	Tangkerang Utara	05	Rehap Pos Kamling	Rp. 24.230.000,-
3	Tangkerang Selatan	11	Rehap Posyandu	Rp. 24.202.000,-
4	Tangkerang Labuai	12	Rehap Semenisasi	Rp. 24.193.000,-

Sumber : Kantor Lurah Tangkerang Selatan

Berdasarkan data 2017 diatas terlihat bahwa jenis kegiatan fisik di Kelurahan Tangkerang Selatan dari 12 RW yang ada hanya 1 RW yang didanai usulannya, yaitu RW 11. Berdasarkan wawancara dan data tersebut terlihat bahwa efisiensi program PMB-RW, jika dilihat dari perbandingan input dan outputnya kurang efektif. hal ini berdasarkan observasi penulis dengan input anggaran yang disetujui jauh dari dana yang diusulkan

### 3. Kepuasa Program PMB-RW

Kepuasa merupakan ukuran untuk menunjukan tingkat dimana organisasi dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Berdasarkan uraian tugas pelaksana Program PMB-RW terlihat bahwa tupoksi masing-masing jelas. Namun dalam kegiatan program PMB-RW ditemukan pola komunikasi antara pendamping, tim koordinasi kecamatan dan LKM kelurahan masih belum efektif.

### 4. Keunggulan Program PMB-RW

Berbagai kebijakan pemberdayaan masyarakat fokusnya masih di tataran kelurahan, sehingga masyarakat di tingkat RW masih mengalami kendala informasi

untuk mengakses beberapa program yang ada di tingkat kelurahan, sehingga dengan munculnya program PMB-RW ini dapat menjawab persoalan tersebut

Adapun Prinsip PMB-RW yang menjadi keunggulannya dibandingkan program pemberdayaan lain adalah :

- a. Pemberdayaan Sosial meliputi kegiatan yang berhubungan dengan upaya peningkatan kerukunan, keamanan, dan kedamaian masyarakat,
- b. Pemberdayaan Ekonomi meliputi kegiatan yang berhubungan dengan membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesempatan kerja menuju masyarakat sejahtera,
- c. Pemberdayaan Lingkungan meliputi gerakan dan kegiatan yang dapat menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan asri.

## 5. Pengembangan Program PMB-RW

Pengembangan adalah merupakan mengukur kemampuan Program untuk meningkatkan kapasitasnya dalam menghadapi tuntutan masyarakat. Program PMB-RW dengan 3 fase pelaksanaannya tentu mengarah kepada pengembangan program. Fase pelaksanaan PMB-RW dibagi dalam 3 tahapan, yaitu :

- a. Fase Inisiasi adalah dimana seluruh tahapan dan proses pemberdayaan dimotori oleh pemerintah. pada fase ini masyarakat dilibatkan secara aktif dalam kegiatan, namun dalam pendanaannya sebagian besar bersumber dari pemerintah selama 5 (lima) tahun,
- b. Fase Partisipatori adalah tahapan dimana proses pemberdayaan dilakukan bersama oleh pemerintah

dan masyarakat. Pada fase ini masyarakat terlibat secara aktif dalam kegiatan pembangunan untuk menuju kemandirian, sebagian pendanaan masih bersumber dari pemerintah selama 3(tiga) tahun

- c. Fase Mandiri adalah tahapan dimana seluruh proses pemberdayaan dilakukan secara mandiri oleh masyarakat, sedangkan pemerintah hanya berfungsi sebagai fasilitator dan regulator. Pada fase ini seluruh pendanaan kegiatan pemberdayaan berasal dari kemandirian LKM-RW.

Berdasarkan uraian Fase dan tahapan pelaksanaan program PMB-RW diatas terlihat bahwa pengembangan program PMB-RW diharapkan nanti dapat membuat masyarakat lebih mandiri dalam kegiatan peningkatan kesejahteraan.

## Faktor – faktor yang mempengaruhi Efektivitas Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) dalam Mewujudkan Prinsip Tridaya di Kota Pekanbaru

1. Faktor hubungan antara tingkat organisasi pelaksana program. factor hubungan ini adalah berkaitan dengan komunikasi dan koordinasi dari setiap tingkatan pelaksanaan program PMB-RW mulai dari tim koordinasi kota, tim koordinasi kecamatan, tim fasilitator, sampai ke lembaga keswadayaan masyarakat rukun warga (LKMRW).
2. Partisipasi masyarakat dalam pekerjaan fisik dan non fisik masih tergolong minim, hanya pada beberapa lokasi kegiatan.

## Kesimpulan

Proses program, Keunggulan Program PMB-RW, Pengembangan

Program PMB-RW menunjukkan efektif. Untuk indikator efisiensi program, kepuasan Program PMB-RW belum efektif. Sedangkan faktor – factor yang mempengaruhi Efektivitas Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMB-RW) dalam Mewujudkan Prinsip Tridaya di Kota Pekanbaru adalah Faktor hubungan antara tingkat organisasi pelaksana program. Dan Partisipasi masyarakat tergolong minim.

### Daftar Pustaka

- Agung, Kurniawan 2005. Transformasi Pelayanan Publik. Yogyakarta: Pembaharuan
- Arikunto, S. dan Jabar.2004. Evaluasi Program Pendidikan. Jakarta : Bumi Aksara
- Depdikbud. 1990. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta : Balai Pustaka.
- Effendy, Onong Uchjana. 1989. KAMUS KOMUNIKASI. Bandung : PT. Mandar Maju
- Gibson, Ivancevich, Donnelly.1996. Organisasi, Perilaku, Struktur, Proses. Bina Rupa Aksara: Jakarta
- Hettne, Bjorn.2001.Teori Pembangunan dan Tiga Dunia.Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama
- I Nyoman Sumaryadi.2005.Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah.Jakarta : Citra Utama
- Keban, Yoremias T. 2008. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori dan Isu (edisi ke-2). Yogyakarta: Gava Media.
- Mahmudi, (2005). Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta : UPP AMP YKPN.
- Maleong, Lexy J. 2004. Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, Riant D. 2004. Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi. PT. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- . 2009. Public Policy (Edisi Revisi). Jakarta: PT.Elex Media Komputindo.
- . 2010. Public Policy (Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan). Jakarta: PT.Elex Media Komputindo.
- Parsons, Wayne. 2005. Public Policy. Jakarta: Prenada Media Group.
- Purwanto, Erwan Agus dan Dyah.2012. Implementasi Kebijakan Publik : Konsep dan Aplikasinya di Indonesia.Yogyakarta : Gava Media
- Sedarmayanti, 1995, Sumber Daya Manusia dan Produktivitas kerja, Penerbit Ilham Jaya, Bandung.
- Siti Maisarah.2017.Dinamika Pembahasan dan Pengesahan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PB-RW) Kota Pekanbaru. Skripsi Universitas Riau
- Soemitro,Sutyastie remi dan Prijono Tjiptoherijanto.2002.Kemiskinan dan Ketidakmerataan di Indonesia.jakarta : PT Rineka Cipta
- Subarsono. 2009. Analisis Kebijakan Publik (konsep, teori dan aplikasi). Bandung : Pustaka Pelajar
- Sugyono. 2005. Metode Penelitian Administrasi. Bandung: ALFABETA.
- Suharto, Edi. 2008. Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
- Sujianto. 2008. Implementasi Kebijakan Publik. Pekanbaru: Alaf Riau.
- Susanto, Astrid S. (1975). Efektifitas. Bandung: Bina Cipta
- Steers, M Richard. (1985). Efektivitas Organisasi Perusahaan. Jakarta: Erlangga.

- Talgia.2017.Proses Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (Pmb-Rw) Di Kota Pekanbaru.Tesis IPDN Jakarta
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2008. Kebijakan dan Manajemen Otonomi Daerah. Yogyakarta: Lukman Offset.
- Tisa Juniazti.2017.Partisipasi Perempuan Dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Rukun Warga (Pmb-Rw) Di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.Skripsi Universitas Riau
- Usman, Sunyoto.2010.Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Wahab, Solihin Abdul. 2004. Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.
- Winarno, Budi. 2005. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media Presindo.
- Wrihatnolo dan Nugroho.2007.Manajemen Pemberdayaan.Jakarta : PT. Alex Media Komputindo
- Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia,2010.Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Pedesaan. Jakarta